

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
(Suatu Studi Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur)**

*Selina Sambenga¹
Sarah Sambiran²
Neni Kumayas³*

Abstrak

Permasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Pondang banyak masyarakat kurang aktif ikut berpartisipasi dan juga pemerintah kelurahan yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya adalah studi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Pengumpulan data terdiri atas data primer yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan dan data sekunder yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data secara kualitatif untuk menggambarkan. Berdasarkan data pada hasil penelitian penulis mengklasifikasikan peran pemerintah Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur menunjukkan kategori relatif cukup tinggi. Hal ini terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur adalah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Dalam lingkup sekitar partisipasi bisa diartikan yaitu keikutsertaan atau tindakan untuk "mengambil bagian" seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari dukungan dan keikutsertaan anggota masyarakat. sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar terlaksananya program yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya program pemerintah. Melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan yang ada bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat dalam mempererat

sekelompok masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Terlaksananya program pemerintah sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat pemerintah tidak akan mencapai hasil secara optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat pemerintah juga membutuhkan strategi yang tepat agar terlaksananya program tersebut. Adapun usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dapat ditempuh melalui sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat dan bukti nyata dari semua yang menjadi keinginan masyarakat, juga pemerintah perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan harus sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Cara ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga dalam memberi diri langsung disetiap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dengan demikian dapat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kelurahan dan masyarakat agar dapat mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan datang.

Peran seorang pemimpin dalam hal ini Lurah, sangatlah penting untuk menyelenggarakan pemerintahan karena Lurah merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Kelurahan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan pemerintah Kelurahan merupakan tugas Lurah beserta Perangkat-perangkat Kelurahan. Gaya kepemimpinan efektif dibutuhkan pemimpin untuk

dapat meningkatkan kinerja semua pegawai termasuk Lurah dalam melaksanakan Pelayanan Publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat juga masih perlu terus ditingkatkan sesuai dengan tugas dari Lurah menurut PPRI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Namun pada kenyataannya, masih banyak masalah-masalah yang timbul dalam pemerintahan Kelurahan itu sendiri baik dari peran Lurahnya, Perangkat Kelurahan maupun dari segi partisipasi masyarakat. Pada kenyataannya banyak masyarakat kelurahan pondang kurang ikut berpartisipasi, dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing, masyarakat hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi. Ini juga disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis, menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Pondang belum bisa dikatakan baik mungkin karena masyarakat menganggap sudah berada dalam lingkup perkotaan yang acuh tak acuh dalam berpartisipasi.

Hal ini terlihat masih banyak masyarakat yang belum terlibat langsung dengan program-program pemerintah yang masyarakat sendiri harus terlibat langsung didalamnya. Berdasarkan uraian diatas maka menyadari akan pentingnya peran pemerintah dalam hal ini lurah yang menjadi kepala pemerintahan di Kelurahan Pondang, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara baik, akan cukup beralasan

untuk mengangkat dan membahas masalah “peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat”.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pondang? Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Tinjauan Pustaka

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. (Miftah Thoha, 1997). Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Menurut Inu Kencana Syafie (2011), pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan

di wilayah kecamatan. Lurah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat (PPRI No. 73 Tahun 2005, Pasal 3).

Menurut PP Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tugas Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, Lurah juga melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Lurah adalah sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Soekanto Soerjono (1985:28). Bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena

mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Edi Suharto : 2010).

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevakuasi perubahan yang terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. (Moleong 2006) dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian dilapangan. Fokus penelitiannya adalah studi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur yang berjumlah 10 orang. Pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder : Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di

lapangan. Data sekunder adalah merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bersumber dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan dan penarikan verifikasi.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian terhadap informan A.L. sebagai Lurah Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan kelurahan, juga menerima informasi langsung dari masyarakat tentang keinginan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan F.L. sebagai Sekretaris Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan kelurahan, juga menerima informasi langsung tentang keinginan masyarakat pelaksanaan rapat musyawarah kelurahan dalam perencanaan pembangunan Kelurahan.

Dari hasil wawancara terhadap informan I.U. sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan kelurahan, juga menerima informasi langsung tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan Y.L. sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah sebagai kepala lingkungan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui menerima informasi langsung

tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan H.S. sebagai anggota masyarakat Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah melalui Lurah, dan perangkat kelurahan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan informasi langsung tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan J.G. sebagai anggota masyarakat/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah Lurah dan perangkat kelurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan melalui rapat-rapat musyawarah kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan A.R. sebagai anggota masyarakat mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah

melalui Lurah, dan perangkat kelurahan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan informasi langsung tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat kelurahan melalui rapat-rapat musyawarah kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan M.A. sebagai anggota masyarakat/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah melalui Lurah, dan perangkat kelurahan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan informasi langsung tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat kelurahan melalui rapat-rapat musyawarah kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan B.T. sebagai anggota masyarakat mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah Lurah dan perangkat kelurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan melalui rapat-rapat musyawarah kelurahan dalam

rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan M.T. sebagai anggota masyarakat mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah Lurah dan perangkat kelurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan melalui rapat-rapat musyawarah kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari data penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan pemerintah kelurahan dalam menyalurkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur adalah baik. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan kelurahan.

Peran pemerintah kelurahan didalam meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur kepada informan telah diajukan pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau implementasi rencana pembangunan tidak lain adalah keikutsertaan masyarakat desa didalam menunjang terlaksananya kebijakan atau rencana/program pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga

kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian tentang kerelaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur. Dari hasil penelitian tentang kerelaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur terlihat informasi dari sampel informan berikut ini.

Dari hasil penelitian terhadap informan A.L. sebagai Lurah Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur melalui keikutsertaan masyarakat desa didalam menunjang terlaksananya kebijakan atau rencana/program pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan bersama. Hal ini dilakukan dengan mengajak keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan, dengan diikuti dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan F.L. sebagai Sekretaris Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah dengan dilakukan dengan menghimbau bahkan mengajak keikutsertaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan, dengan diikuti dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan I.U. sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah dengan memberikan sosialisasi atau penerangan dan penjelasan kepada masyarakat tentang arti pentingnya rencana pembangunan yang akan dilakukan sehingga kepada masyarakat melalui kepala lingkungan untuk memberikan kesempatan dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan, dengan diikuti dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan

Amurang Timur yang sudah menjadi program pemerintah.

Dari hasil wawancara terhadap informan Y.L. sebagai Kepala Lingkungan I Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah sebagai kepala lingkungan mengajak dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara terhadap informan H.S. sebagai anggota masyarakat Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah melalui Lurah, dan perangkat kelurahan lainnya menghimbau, mengajak, dan merangsang melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjang program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat kelurahan dalam rencana pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Dari hasil wawancara terhadap informan J.G. sebagai anggota masyarakat/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondang mengemukakan bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah Lurah dan perangkat kelurahan terutama para kepala lingkungan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa uang tunai, bahan atau peralatan kerja, tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong, serta sumbangan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya rencana pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan di Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur.

Kesimpulan

1. Peran pemerintah kelurahan dalam menyalurkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur adalah baik. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan kelurahan.
2. Peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah baik.
3. Peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur berada pada kategori yang relatif kurang.

4. Peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur adalah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur berada pada kategori relatif cukup baik.
5. Peran pemerintah Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur menunjukkan kategori relatif cukup tinggi.

Saran

1. Perlu adanya motivasi melalui kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam menimbulkan kesadaran masyarakat, karena hal ini juga sangat menentukan berhasilnya pembangunan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur .
2. Hendaknya pemerintah lebih menunjang keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk ikutserta dalam pembangunan kelurahan di Kecamatan Amurang Timur.
3. Disarankan agar lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan untuk lebih dapat meningkatkan peranannya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur.

4. Diharapkan agar masyarakat lebih dapat lebih meningkatkan peransertanya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur.
5. Perlu adanya motivasi melalui kepemimpinan Lurah dalam menimbulkan kesadaran masyarakat, karena hal ini juga sangat menentukan berhasilnya pembangunan di Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beratha. I. Nyoman, 1982, Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bryant, C. dan L.G, White. 1999, Managing Development, Colorado; Westview Press Inc..
- Cohen Bruce, 1992, sosiologi suatu pengantar, Jakarta; Penerbit Rineka Cipta,
- Kartasasmita Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan) Jakarta : PT. Pustaka SIDESINDO.
- Koentjaraningrat, 1979. Pembangunan dan Partisipasi, Jakarta; BP. Gramedia.
- Lysen, A, 1985. Individu dan Management, Tanpa Penerbit.
- Moleong, Lexy J, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. 2000, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta : Rineke Cipta.
-, 1982, Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa. Jakarta : Bina Aksara.
- Soekanto Soerjono., 1990 Sopsiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto soerjono, 2002. Teori peranan. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Suharto Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama
- Syafiie Inu Kencana. 2011. Pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama
- Riduwan., 2009, Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Theresia Aprillia, NTP,MSi dkk pembangunan berbasis masyarakat, Bandung : Penerbit alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. 1995, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung.
- Uphoff N.T. dan W.F, Ilchman. 1992, The Political Economy Of Development, New York.: Mc Graw-Hill Book Company, Inc.
- Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, Bandung: Penerbit FokusMedia, 2008.